



## **PENDAHULUAN**

# **LATAR BELAKANG FILSAFAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UMUM**

### **PENGANTAR**

Perubahan terjadi di dunia dewasa ini terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini menyebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi anutan hidup telah kehilangan otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik; sekaligus juga berpengaruh di bidang moral; serta sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia khususnya Negara berkembang, terutama Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan politik dari era otoriterian ke era demokrasi, pendidikan kewarganegaraan melalui mata kuliah kewiraan dianggap sudah tidak relevan dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Mata kuliah pendidikan kewiraan ditinggalkan karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:

- Pola pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik,
- Materi ajarannya yang sarat dengan kepentingan ideologi rezim (orde baru),
- Mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotor.

Dengan demikian pendidikan kewiraan telah keluar dari semangat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan demokrasi reorientasi pendidikan kewargaan (civic Education) sebagai penggantinya.

Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara efektif adalah melalui bidang pendidikan. Upaya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan di bidang kurikulum. Kurikulum pengajaran di perguruan tinggi, harus mampu menjawab masalah transformasi nilai-nilai tersebut. Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kurikulum perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti pendidikan kewarganegaraan, perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan dan searah dengan desain kurikulum bidang studi di perguruan tinggi.
2. Proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat mendidik dan dialogis.
3. Profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus-menerus ditingkatkan.

Semua ini dijabarkan ke dalam tiga to pik meliputi:

1. Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun masyarakat demokrasi berkeadaban; serta
3. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi umum; sebagai dasar nilan dan pedoman berkarya bagi lulusan.
- 4.

| Sejarah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran yang mengajarkan demokrasi di Indonesia |                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| No                                                                                                       | Tahun           | Nama Mata Pelajaran/Kuliah                |
| 1                                                                                                        | 1957 - 1962     | Civis                                     |
| 2                                                                                                        | 1960an          | Manipol dan Usdek, Pancasila dan UUD 1945 |
| 3                                                                                                        | 1964            | Pendidikan Kemasyarakatan                 |
| 4                                                                                                        | 1968-1969       | Pendidikan Kewargaan Negara               |
| 5                                                                                                        | 1973            | Pendidikan civicsdan hukum                |
| 6                                                                                                        | 1973 - 1984     | Pendidikan Moral Pancasila                |
| 7                                                                                                        | 1970an          | Filsafat Pancasila                        |
| 8                                                                                                        | 1994            | PPKn                                      |
| 9                                                                                                        | 1989 – 1990an   | Pendidikan Kewiraan                       |
| 10                                                                                                       | 2000 - sekarang | Pendidikan Kewarganegaraan                |

#### A. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 37 Ayat (2) UU.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat:

1. Pendidikan Agama,
2. Pendidikan Kewarganegaraanm dan
3. Bahasa

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa dan No.045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok mata-kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Secara ideal pendidikan kewarganegaraan memegang peran untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsasn, aktualiasasi dari pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuwan professional, sekaligus

WNI yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air ( nasionalisme) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan tinggi nasional yang telah dicanangkan 2003-2010.

Proses pembedaan sebagai pemupukan nasionalisme, serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa sebagai calon cendekiawan, ilmuwan, atau tenaga profesionalisme yang berkemampuan kompetitif secara internasional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola kurikulum berbasis Kompetensi (KBK)

## B. Materi Kajian Pendidikan Kewarganeraan

Berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi 2003-2010, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melahirkan warga Negara yang dimiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi;
2. Melahirkan warga Negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya;
3. Melahirkan warga Negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, serta menghormati supremasi hukum (rule of law/rechstaat).
4. Melahirkan warga Negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik; serta
5. Melahirkan warga Negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai “civil society”

Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ke depan seyogyanya meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Filsafat Pancasila;
2. Nasionalisme dan Identitas Nasional;
3. Hubungan Negara dan Warga Negara; Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia;
4. Demokrasi, *Rule of Law*, dan Hak Asasi Manusia; serta
5. Geopolitik dan Geostrategi

| NOMENKLATUR/TERMINOLOGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| USA                                                         | : Civics, civiv Education                       |
| Inggris                                                     | : Citizenship Education                         |
| Timur Tengah                                                | : Ta’limatul Muwwatanah<br>Tarbiyatul Watoniyah |
| Mexico                                                      | : Education Civicas                             |
| Jerman                                                      | : Sachunterricht                                |
| Australia                                                   | : Civics, Social Studies                        |
| New Zealand                                                 | : Social Studies                                |
| Afrika Selatan                                              | : Life Orientation                              |
| Hongaria                                                    | : People and Society                            |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Singapura | : Civics and Moral Education |
| Rusia     | : Obscesvovedinie            |
| Indonesia | : Pendidikan Kewarganeraan   |

### C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan besendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga Negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni. Kualitas warga Negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

### D. Kompetensi yang diharapkan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seseorang warga Negara dalam berhubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah Negara, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawab tampak pada kebenaran tindakan, ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- 2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- 4) Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
- 5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara Kesatuan RI diharapkan mampu: “memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan UUD 1945”.